

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JENEPONTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Pada kesempatan ini izinkanlah kami menghaturkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas semua kebaikan tersebut.

Kami menyadari bahwa Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan selanjutnya.

Semoga dokumen ini memberikan manfaat utamanya didalam merumuskan kebijakan-kebijakan dan perbaikan dalam pengembangan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di : Jeneponto_
Pada Tanggal : Juni 2021

Kepala Dinas,


H. MUHAMMAD JAFAR ABBAS, SE, M.Pd.
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. : 19660620 199403 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	23
2.4 Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	30
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	33
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	33
3.2 Tujuan, Sasaran	33
3.3 Program dan Kegiatan.....	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	45
BAB IV PENUTUP.....	53

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2020	11
TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12
TABEL 2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017	13

TABEL 2.4 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2017.....	14
TABEL 2.5 PENGGABUNGAN PRIORITAS MASUKAN MASYARAKAT DENGAN RANCANGAN RENJA SKPD 2017	15
TABEL 3.1 IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	17
TABEL 3.2 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017.....	20

DAFTAR LAMPIRAN

SK PENETAPAN RENJA	
--------------------------	--

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Guna mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggungjawaban Pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*), dengan kata lain pemerintah diarahkan untuk lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu entitas pelaksana Pemerintahan Daerah dan lebih tepatnya disebut sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

berpedoman pada perencanaan strategis yang telah disusun yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jenepono yang bersifat indikatif. Renstra-SKPD tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang memuat kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra-SKPD maupun RPJMD merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja sumber daya manusia aparatur dan sumber daya lain yang terintegrasi di dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah agar mampu menjawab tujuan pembangunan daerah dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu tahun 2018-2023 oleh Kabupaten Jenepono yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

Secara substansial, Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jenepono Tahun Anggaran 2022 merupakan penjabaran dari Tujuan, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jenepono 2018-2023 yang disesuaikan dengan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Jenepono dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jenepono periode tahun 2018-2023.

Rencana Kerja adalah dokumen resmi perencanaan daerah tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang disusun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah rencana kerja tahunan yang merupakan dokumen perencanaan yang

menggambarkan potret kebutuhan pembangunan perekonomian serta indikator sasaran program yang akan dilaksanakan secara terencana dan merupakan program kegiatan prioritas melalui sumber pembiayaan APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan sumber anggaran lain yang sah sesuai peraturan perundangan yang berlaku dalam kurun waktu satu tahun yaitu tahun anggaran 2022.

Rencana Kerja menjadi instrument penting bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengartikulasikan secara langsung Tupoksi dan perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalam memecahkan masalah. Melalui Rencana Kerja SKPD, masing-masing SKPD dan pemangku kepentingan lain dapat menetapkan alternatif program atau kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan strategi intervensi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

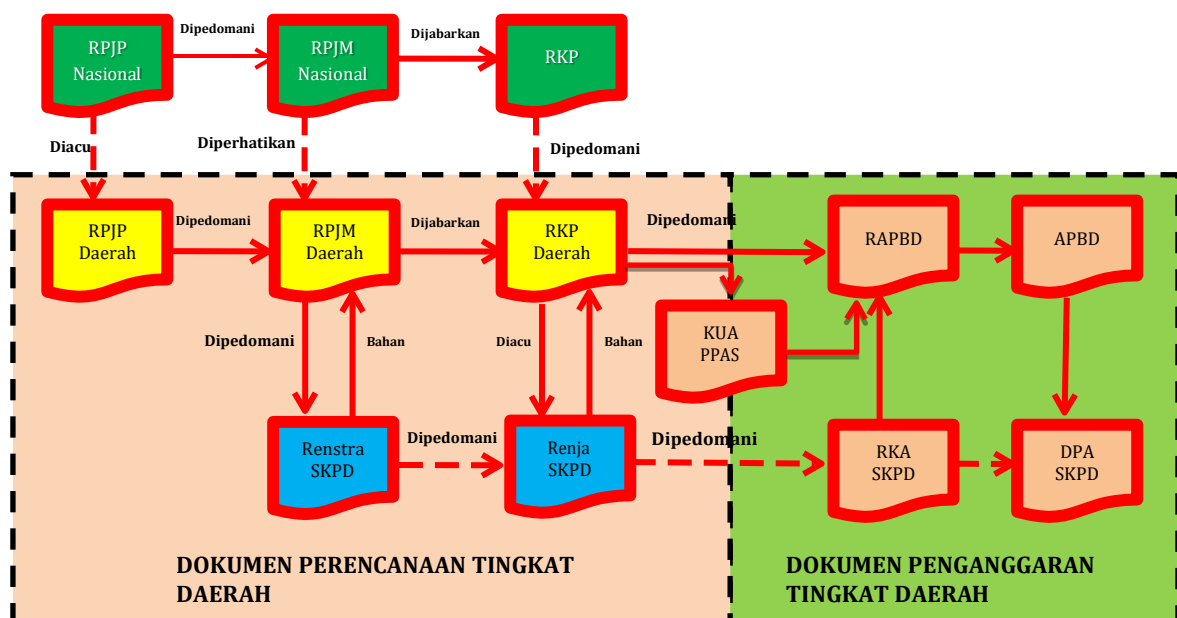
Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dilakukan dalam 4 (empat) tahapan pokok, yaitu;

1. Persiapan penyusunan Renja SKPD;
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD
 - Orientasi mengenai Renja SKPD
 - Penyusunan Agenda Kerja
 - Pengumpulan Data dan Informasi
2. Penyusunan rancangan Renja SKPD;
 - Tahap perumusan rancangan Renja SKPD; dan
 - Tahap penyajian rancangan awal Renja SKPD.
3. Pelaksanaan forum SKPD untuk penyusunan rancangan akhir Renja SKPD
 - Pelaksanaan Forum SKPD/Gabungan SKPD
 - Penyusunan rancangan akhir Renja SKPD
4. Penetapan Renja SKPD.
 - Penyempurnaan rancangan akhir Renja SKPD dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.

- Verifikasi oleh Bappeda untuk memastikan rancangan Renja SKPD telah sesuai dengan RKPD .
- Pengesahan rancangan Renja SKPD oleh Bupati yang disampaikan oleh Kepala Bappeda
- Penetapan dengan SK Bupati

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto Kabupaten Jeneponto selain mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra SKPD) juga memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Daerah, RPJM Daerah, hasil Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, hasil pelaksanaan Musrenbang Kabupaten, RKPD Kabupaten Jeneponto, serta usulan yang dituangkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Jeneponto. Rencana Kerja ini selanjutnya disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto untuk disusun dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) inilah yang akan menjadi acuan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran RAPBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022.

Keterkaitan Renja SKPD dengan RKPD, Renstra SKPD, Renja K/L dan Tindak lanjut Proses Penyusunan APBD dapat digambarkan sebagai berikut :



1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 1266, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 02 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor : 150);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 03 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor : 151);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Jeneponto Nomor 01 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023
 25. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor : 27 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto;
 26. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 49 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto tahun Anggaran 2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari RPJMD dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif serta prakiraan maju program/ kegiatan berdasarkan RKPD dan Tupoksi SKPD.

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan gambaran tentang evaluasi hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 dibandingkan dengan capain kinerja berdasarkan Renstra tahun 2018-2023;
- b. Memberikan gambaran tentang isu-isu strategis dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang perdagangan dan perindustrian selama lima tahun yakni tahun 2018-2023 dan merumuskan isu-isu strategis yang harus ditangani tahun 2022;
- c. Mendiskripsikan tentang program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto Pada Tahun 2022;
- d. Memberikan arahan tentang tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang harus dijadikan pedoman para pejabat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada akhir tahun 2022.
- e. Menjabarkan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 dalam rencana program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2022 Sehingga program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitik beratkan pada program dan kegiatan prioritas;

- f. Menjadi pedoman dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto pada Tahun Anggaran 2022;
- g. Memberikan gambaran tentang pagu indikatif pembiayaan program kegiatan yang menjadi dasar penyusunan rancangan rencana kerja anggaran (RKA) Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah secara substansi memuat hal-hal utama sebagai berikut :

- a. Program dan Kegiatan, meliputi kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif, maupun kegiatan baru.
 - Program dan kegiatan yang sedang berjalan, yaitu program dan kegiatan yang dijalankan pada tahun anggaran berjalan atau satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam Renstra SKPD;
 - Program dan kegiatan alternatif, yaitu program dan kegiatan SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah;
 - Program dan kegiatan baru, yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra SKPD tetapi dapat ditambahkan, dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
 2. Dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra SKPD;
 3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau.

4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD.
- b. Lokasi Kegiatan; merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama Lingkungan/Dusun, desa/kelurahan, kecamatan, tersebar di Kecamatan, Tingkat Kabupaten.
- c. Indikator Kinerja; rumusan ringkas yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil (*outcome*) yang akan dicapai dari program; masukan (*input*), keluaran (*output*) yang akan dicapai dari kegiatan.
- d. Kelompok Sasaran; memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan yang kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
- e. Pagu Indikatif dan Prakiraan Maju; memuat kebutuhan dana untuk tahun perencanaan dan tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

22. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
23. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goalds), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
24. Review terhadap Rancangan Awal Berisikan uraian mengenai: Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

25. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

31. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
32. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD
33. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN, menguraikan tentang Uraian Rencana Program dan Kegiatan beserta jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD meliputi telaahan :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian prioritas dan target program Renstra SKPD dilakukan melalui :

- a. Identifikasi sasaran, prioritas program dan target kinerja program.
- b. Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra SKPD.

- c. Rumuskan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian.
- d. Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun berjalan. Misalnya program apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya

Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 meliputi Rencana Kerja keseluruhan yang diajukan maupun Rencana kerja yang disetujui dan ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pengguna Anggaran SKPD (RKA-DPA).

Perlu untuk diperjelas bahwa Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 yang diajukan pada bulan Mei Tahun 2020 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto dari seluruh Program dan Kegiatan yang tercantum RKPD Tahun 2020 tidak dapat diakomodir secara keseluruhan dalam RKA dan DPA oleh karena keterbatasan atau sangat minimnya dukungan Anggaran yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jeneponto.

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD
Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA SKPD Sampai
dengan Tahun 2020**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran
	BELANJA PEGAWAI	3.350.864.375	3.212.792.943	138.071.432
	BELANJA BARANG DAN JASA	2.412.092.000	2.355.445.568	56.646.431
	BELANJA MODAL	411.562.000	387.814.000	23.748.000
	- Tanah	-	-	-
	- Peralatan dan Mesin	385.142.000	361.985.000	23.157.000
	- Gedung dan Bangunan	-	-	-
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan	26.420.000	25.829.000	591.000
	- Lainnya			
5	BELANJA DAERAH	6.174.518.375	5.956.052.512	218.465.863
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.350.864.375	3.212.792.943	138.071.432
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3.350.864.375	3.212.792.943	138.071.432
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	3.335.264.375	3.197.192.943	138.071.432
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	2.442.633.340	2.331.987.400	110.646.140
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	195.356.509	185.707.866	9.648.643
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	141.719.429	140.450.000	1.269.429
5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	89.899.036	84.845.000	5.054.036
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	124.438.251	117.754.920	6.683.331
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.239.153	2,167,039	927.886
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	37.574	35.631	1.943
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	194.413.463	99.704.966	4.708497
5.1.1.01.23	Tunjangan JKK	5.405.378	5.158.551	246.827
5.1.1.01.24	Tunjangan JKM	16.216.142	15.475.670	740.472
5.1.1.01.25	Tunjangan Hari Raya	213.905.900	213.905.900	0
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	15.600.000	15.600.000	0
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	15.600.000	15.600.000	0
5.2	BELANJA LANGSUNG	3,022,236,000	2,813,209,837	209,026,163
206.20601.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.780.000	60.984.594	50.795.406
5.2.2.03.02	Belanja Air	3.780.000	2.505.000	1.275.000
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	108.000.000	58.479.594	49.520.400
206.20601.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	24.200.000	24.200.000	0
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.000.000	5.000.000	0
5.2.2.03.12	Belanja Upah Jasa	19.200.000	19.200.000	0
206.20601.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	6.000.000	0
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.000.000	6.000.000	0
206.20601.01.20	Pelaksanaan Administrasi Umum	58.840.000	58.840.000	0
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.720.000	1.720.000	0
5.2.2.03.12	Belanja Upah Jasa	58.120.000	58.120.000	0
206.20601.01.21	Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor, Koordinasi, Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	59,550,000.00	59,550,000.00	-

5.2.2.11.102	Belanja makan dan minuman rapat	34,650,000.00	34,650,000.00	0
5.2.2.15.501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24,900,000.00	24,900,000.00	0
206.20601.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	365.142.000	361.985.000	33.157.000
5.2.3.11.07	Belanja Modal Air Conditioner	50.000.000	45.000.000	5.000.000
5.2.3.11.09	Belanja Modal Televisi	7.500.000	7.450.000	50.000
5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	140.000.000	127.015.000	12.385.000
5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	41.222.000	41.000.000	222.000
5.2.3.12.14	Belanja Modal Pengadaan Komputer Tablet	17.500.000	16.900.000	600.000
5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	25.000.000	24.950.000	50.000
5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	30.000.000	29.950.000	50.000
5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Sofa	30.000.000	29.350.000	50.000
5.2.3.13.13	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi	30.000.000	26.475.000	3.525.000
5.2.3.14.03	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	5.000.000	4.375.000	625.000
5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	8.920.000	8.920.000	0
206.20601.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	220.470.000	219.852.000	618.000
5.2.2.20.005	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	220.470.000	219.852.000	618.000
206.20601.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	65.000.000	65.000.000	0
5.2.2.03.12	Belanja Upah Jasa	18.000.000	18.000.000	0
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000	15.000.000	0
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	30.000.000	30.000.000	0
5.2.2.29.02	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2.000.000	2.000.000	0
206.20601.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1.110.000	590.000	520.000
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	520.000	0	520.000
5.2.2.03.12	Belanja Upah Jasa	0	0	0
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000	100.000	0
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	490.000	490.000	0
5.2.2.11.01	Belanja makan dan minuman harian pegawai	0	0	0
206.20601.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	10.000.000	10.000.000	0
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	995.000	995.000	0
5.2.2.03.12	Belanja Upah Jasa	3.600.000	3.600.000	0
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000	300.000	0
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.769.950	1.769.950	0
5.2.2.11.01	Belanja makan dan minuman harian pegawai	4.950.000	4.950.000	0
206.20601.06.05	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	17.500.000	17.500.000	0
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.705.050	1.705.050	0
5.2.2.03.12	Belanja Upah Jasa	3.600.000	3.600.000	0
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000	300.000	0
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.769.950	1.769.950	0
5.2.2.11.01	Belanja makan dan minuman harian pegawai	10.125.000	10.125.000	0

206.20601.06.06	Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	11.260.000	11.870.000	-610.000
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.705.050	1.705.050	0
5.2.2.03.312	Belanja Upah Jasa	3.600.000	3.600.000	0
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000	300.000	0
5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	1.769.950	1.769.950	0
5.2.2.11.01	Belanja makan dan minuman harian pegawai	10.125.000	10.125.000	0
206.20601.06.07	Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.720.000	6.130.000	410.000
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.040.000	2,470,000.00	410.000
5.2.2.03.12	Belanja Upah Jasa	3.600.000	6,000,000.00	0
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	240.000	1,080,000.00	0
5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	840.000	5,250,000.00	0
5.2.2.11.01	Belanja makan dan minuman harian pegawai	0	0	0
206.20601.07.01	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah	11.590.000	11.590.000	0
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.570.000	1.570.000	0
5.2.2.03.12	Belanja Upah Jasa	4.800.000	4.800.000	0
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000	120.000	0
5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	1.050.000	1.050.000	0
5.2.2.11.01	Belanja makan dan minuman harian pegawai	4.050.000	4.050.000	0
206.20601.07.03	Penyusunan RKA dan DPA	17.440.000	17.424.000	16.000
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.366.000	2.366.000	16.000
5.2.2.03.12	Belanja Upah Jasa	4.800.000	4.800.000	0
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000	2.000.000	0
5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	1.974.000	1.974.000	0
5.2.2.11.01	Belanja makan dan minuman harian pegawai	6.300.000	6.300.000	0
206.20601.08.02	Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26.420.000	25.829.000	591.000
5.2.3.32.01	Belanja Modal Pengadaan Sistem Informasi dan Teknologi	26.420.000	25.829.000	591.000
206.20601.15.02	Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK	0.00	0.00	0
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0.00	0.00	0
5.2.2.03.12	Belanja Upah Jasa	0.00	0.00	0
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0.00	0.00	0
5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	0.00	0.00	0
5.2.2.08.04	Transportasi dan Akomodasi	0.00	0.00	0
206.20601.15.05	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	0.00	0.00	0
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0.00	0.00	0
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0.00	0.00	0
5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	0.00	0.00	0
5.2.2.11.02	Belanja makan dan minuman rapat	0.00	0.00	0
206.20601.15.06	Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	1.900.000	1.900.000	0
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.900.000	1.900.000	0
5.2.2.03.12	Belanja Upah Jasa	0	0	0
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0	0	0
5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	0	0	0
5.2.2.11.01	Belanja makan dan minuman harian pegawai	0	0	0

206.20601.15.10	Penyusunan Kebijakan Kependudukan	11.000.000	10.997.000	300.000
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.000.000	1.997.000	3.000
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300,000	300,000	0
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,200,000	4,200,000	0
5.2.2.11.02	Belanja makan dan minuman rapat	4.500.000	4.500.000	0
206.20601.15.14	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	0	0	0
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0	0	0
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0	0	0
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0	0	0
5.2.2.11.02	Belanja makan dan minuman rapat	0	0	0
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0	0	0
206.20601.18.21	Operasional UPTD Wilayah I	0	0	0
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0	0	0
5.2.2.06.01	Belanja Upah Jasa	0	0	0
5.2.2.06.02	Belanja Cetak	0	0	0
5.2.2.11.02	Belanja Penggandaan	0	0	0
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0	0	0
206.20601.18.22	Operasional UPTD Wilayah II	0	0	0
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0	0	0
5.2.2.06.01	Belanja Upah Jasa	0	0	0
5.2.2.06.02	Belanja Cetak	0	0	0
5.2.2.11.02	Belanja Penggandaan	0	0	0
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0	0	0
206.20601.18.27	Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil	10.250.000	10.101.000	149.000
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.175.000	1.026.000	149.000
5.2.2.06.02	Belanja Cetak	375.000	375.000	0
5.2.2.11.02	Belanja Penggandaan	450.000	450.000	0
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.250.000	8.250.000	0
206.20601.15.28	Layanan Pengaduan Kependudukan	15.815.000	16.519.500	-704.500
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.000.000	1.026.000	-704.500
5.2.2.06.12	Belanja Upah Jasa	12.000.000	375.000	0
5.2.2.11.02	Belanja Penggandaan	420.000	450.000	0
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.395.000	8.250.000	0
206.20601.15.31	Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk	22.875.000	22.867.500	7.500
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6.000.000	5.992.500	7.500
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000	1.000.000	0
5.2.2.11.02	Belanja Penggandaan	3.500.000	3.500.000	0
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.375.000	12.375.000	0
206.20601.15.32	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kebijakan Kependudukan	14.375.000	14.374.000	1.000
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.000.000	2.000.000	1.000
5.2.2.03.12	Belanja Upah Jasa	1.800.000	1.800.000	0
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.900.000	6.900.000	0
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.425.000	1.425.000	0
5.2.2.11.01	Belanja makan dan minuman Harian Pegawai	2.250.000	2.250.000	0
5.2.2.11.02	Belanja Makan Minum Rapat	0	0	0

206.20601.15.18	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	567.570.000	567.361.000	209.000
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	34.170.000	33.961.000	209.000
5.2.2.03.12	Belanja Upah Jasa	23.400.000	23.400.000	0
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan Pemerintah	24.000.000	24.000.000	0
5.2.2.03.78	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	108.000.000	108.000.000	0
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.750.000	20.750.000	0
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.730.000	20.730.000	0
5.2.2.08.04	Transportasi dan Akomodasi	298.000.000	298.000.000	0
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi	38.880.000	38.880.000	0
206.20601.16.16	Pengadaan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	505.007.525	504.557.500	450.025
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	96.450.000	96.000.000	450.000
5.2.2.27.01	Belanja Mouse, Flashdisk, Cakram Padat (Compact Disc) dan Hard Disk	408.557.525	408.557.500	25
206.20601.16.17	Penyusunan Data Agregat Kependudukan dan Profil Kependudukan	55.346.000	51.290.000	4.056.000
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.056.000	0	4.056.000
5.2.2.01.14	Belanja Jasa Sistem Informasi dan Teknologi	18.000.000	18.000.000	0
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.500.000	22.500.000	0
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000	3.500.000	0
5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	7.290.000	7.290.000	0
206.20601.15.18	Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	245.000.000	244.894.000	106.000
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	30.550.000	30.444.000	106.000
5.2.2.05.503	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	33,000,000.00	33,000,000.00	0
5.2.2.06.602	Belanja Penggandaan	8,400,000.00	8,400,000.00	0
5.2.2.11.101	Belanja makan dan minuman harian pegawai	108,900,000.00	108,900,000.00	0

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto.

Analisis Gambaran Pelayanan SKPD bertujuan untuk mengkaji capaian kinerja pelayanan SKPD dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam hal ini oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto di biayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Alokasi Khusus (DAK), sedang penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat di biayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Walikota/Bupati melalui Dana Tugas Pembantuan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto tentunya harus ditinjau dari dua aspek yaitu dari aspek pelayanan dan aspek pembinaan. Jika ditinjau dari aspek pelayanan, maka pelaksanaan pemberian pelayanan perizinan pada bidang Perdagangan dan Perindustrian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ratio penduduk ber KTP per satuan penduduk (Versi KTP Nasional) pada Akhir renstra yang lalu mencapai 70 %, diproyeksikan tahun 2020 mencapai 90 %. Seiring dengan program penerapan KTP elektronik, maka penerbitan KTP Non Elektronik dihentikan pada Tahun 2014 dan diganti dengan KTP elektronik.
2. Rasio Rasio bayi ber Akta kelahiran pada Akhir Rentra yang lalu mencapai 95 %, diproyeksikan tahun 2020 mencapai 100 %.
3. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi pada Akhir Renstra yang lalu sudah ada hal ini disebabkan Karena sudah adanya Sistem Administasi Kependudukan sehingga terdapat dapat yang sinkron baik itu Database Kabupaten/Kota, Database Provinsi maupun Database Nasional sudah satu data.
4. Penerapan KTP Nasional berbasis Nik Pada Akhir Renstra yang lalu sudah Berbasis NIK hal ini Seiring dengan program penerapan KTP elektronik, maka penerbitan KTP Non Elektronik dihentikan pada Tahun 2014 dan diganti dengan KTP elektronik.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto dan proyeksi tahun 2020 kami sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian			Target Akhir Renstra
			2018	2019	2020	
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persen	0,77	0,86	0,90	0,84
2	Rasio bayi berakte kelahiran	Persen	0,88	0,83	0,95	1,00
3	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		Ada	Ada	Ada	Ada
4	Indikator Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	77	86,08	86,08	91,77

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

1. Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 dapat diselenggarakan dengan baik, capaian per 31 Desember 2020 rata-rata kinerja out put diatas 91 % dan kinerja outcome diatas 90 %.

Adapun isu-isu strategis lainnya yang masih ada hubungannya dengan penjelasan diatas adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat Kinerja Pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan Pelayanan Dinas :

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa tingkat kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto pada

dasarnya dapat berjalan lancar, walaupun dengan beberapa catatan sebagaimana telah disebutkan. Namun perlu pula disampaikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto tidak dibebani Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga indikator kinerja terhadap capaian kinerja Dinas berdasarkan indikator kinerja tidak dapat kami ukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan (SPM).

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas :

Hal klasik yang seringkali menjadi permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas adalah :

- Seringkali yang menjadi permasalahan adalah pada penetapan kebijakan teknis dinas sulit dalam pencapaiannya.
- Penyusunan Rencana Strategis Dinas yang tidak akomodatif terhadap perkembangan Program Nasional dan Daerah.
- Proses penempatan pejabat tingkat menengah ke bawah yang tidak sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas dari yang bersangkutan.

c. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu Entitas Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto yang menyelenggarakan Tugas Pembinaan dan Pelayanan kepada masyarakat tentunya akan berhadapan dengan tantangan dan peluang dalam pelaksanaannya.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam peningkatan pelayanan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, yaitu :

- Tingkat kualitas, kapasitas, dan kapabilitas dari aparatur yang ada dalam pelaksanaan pemberian pelayanan;
- Sarana dan prasarana yang tersedia yang menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan pemberian pelayanan;

- Tuntutan terhadap pelaksanaan pemberian pelayanan cepat dari masyarakat;
- Pembiayaan bagi pelaksanaan pelayanan yang terbatas;
- Tersedianya banyak produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif;
- Lemahnya kemampuan permodalan kelompok pelaku usaha perdagangan dan IKM; serta
- Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha Perdagangan dan IKM.

Adapun yang menjadi peluang bagi peningkatan pelayanan oleh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, yaitu:

- Tingkat Pendidikan dari aparatur pelaksana pelayanan yang semakin memadai dari waktu ke waktu;
- Keinginan dan Komitmen kuat dari aparatur pelaksana pelayanan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas ilmu dan pengetahuan;
- Adanya upaya-upaya yang strategis dan maksimal dari aparatur untuk memberikan pelayanan yang cepat dan maksimal;

d. Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan prioritas tahun 2020;

Adapun yang menjadi rekomendasi dan catatan strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto sebagai berikut :

- Perlunya penyesuaian secara menyeluruh antara program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil demi pencapaian visi-misi dan strategi serta kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto.

- Program dan Kegiatan Dinas baik yang bersifat Sektoral, Lintas Sektor, dan Lintas Kewilayahan betul-betul dapat sesuai, serasi, dan selaras dalam pelaksanaannya.
- Penetapan Pagu Indikatif terhadap Program dan Kegiatan cenderung tidak berimbang antara satu SKPD dengan SKPD lainnya dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
- Hendaknya juga menjadi perhatian serius di sini adalah penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jeneponto yang sangat Kecil dan tidak memadai dalam penganggaran program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto dengan alasan mengurangi dan mencegah Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jeneponto.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan, kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat Kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan Kepala Daerah terkait Prioritas Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif untuk setiap SKPD berdasarkan Rancangan RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi :

1. Kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan;
2. Indikator kinerja program dan kegiatan;
3. Tolak ukur atau sasaran program dan kegiatan, dan
4. Pagu Indikatif yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Pada bagian review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Apakah sudah sesuai antara

RKPD dengan kebutuhan yang ada. Informasi hasil perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							7,116,648,840				7,334,988,306				
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5,557,035,816				5,735,375,282			
2	12	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							60,000,000				60,000,000		
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023	Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jenepono, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	15,000,000

2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen RKA Pokok	Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	7,500,000
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	7,500,000

2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen DPASKPD	Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	7,500,000
2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	7,500,000

2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	7,500,000
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	7,500,000
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,245,941,104				4,288,907,745	

2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemenuhan Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan ASN yang dibayarkan	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan yang transparan dan akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	12 Bulan	100 %	4,061,961,104	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	4,104,927,745
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Buku Kas Umum (BKU), SPJ Fungsional Dan Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Jumlah Pengelola Keuangan	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan yang transparan dan akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	36 laporan 7 Orang	100 %	171,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	171,480,000

2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan yang transparan dan akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	1 Laporan	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	7,500,000
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Sem esteran SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan yang transparan dan akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	1 Laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	5,000,000
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								680,465,976		670,465,976		

2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Listrik yang disediakan	Tersedianya laporan administrasi umum perangkat daerah yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	5 Jenis	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	30,000,000
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya laporan administrasi umum perangkat daerah yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	1 Laporan	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	15,000,000

2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya laporan administrasi umum perangkat daerah yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	1 Laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	5,000,000
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang undangan yang diadakan	Tersedianya laporan administrasi umum perangkat daerah yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	1 Laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	5,000,000

2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Perjalanan yang di adakan	Tersedianya laporan administrasi umum perangkat daerah yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan	Kab. Jenepono, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	1 Laporan	100 %	615,465,976	Pajak Rokok DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	615,465,976
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							286,400,000			286,400,000		
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 % 100 % 100 %	1 Laporan	100 %	95,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	95,400,000

2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Jenepono, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	1 Laporan	100 %	191,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	191,000,000
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							284,228,736			429,601,561		
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan	Kab. Jenepono, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	1 Laporan	100 %	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	94,630,000

2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	1 Laporan	100 %	219,228,736	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	334,971,561
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							1,369,613,024		1,369,613,024			
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk							155,687,750		155,687,750			
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Laporan Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Bagi Masyarakat Jeneponto	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	85 % 85 % 85 %	1 Laporan	85 %	71,030,750	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	85 % 85 % 85 %	71,030,750
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Jumlah Laporan Pendaftaran Penduduk	Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Bagi Masyarakat Jeneponto	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	85 % 85 % 85 %	1 Laporan	85 %	84,657,000	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	85 % 85 % 85 %	84,657,000

2	12	02	2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk							652,300,000							652,300,000	
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Laporan Hasil Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	85 % 85 % 85 %	1 Laporan	85 %	652,300,000	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga Persentase Cakupan Kepemilikan kartu Tanda Penduduk Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	85 % 85 % 85 %	652,300,000		
2	12	02	2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk							561,625,274							561,625,274	
2	12	02	2.03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat akan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	85 % 85 % 85 %	1 Laporan	85 %	561,625,274	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Persentase Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	85 % 85 % 85 %	561,625,274		
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL							90,000,000								90,000,000	
2	12	03	2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil							90,000,000								90,000,000
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Persentase Penerbitan Akta Kematian	Jumlah Laporan Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Bagi Masyarakat Jeneponto	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	85 % 85 %	1 Laporan	85 %	90,000,000	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Persentase Penerbitan Akta Kematian	85 % 85 %	90,000,000		
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							30,000,000								60,000,000	
2	12	04	2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database							10,000,000								20,000,000

					Kependudukan																	
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Kesediaan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Persentase ketersediaan Data Base Kependudukan	Jumlah Laporan hasil Kerja Sama Pemanfaatan Data kependudukan	Peningkatan Pemanfaatan Data Base Kependudukan	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 % 100 %	1 Laporan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kesediaan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Persentase ketersediaan Data Base Kependudukan	100 % 100 %	20,000,000				
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						10,000,000							20,000,000				
2	12	04	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Persentase Kesediaan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Persentase ketersediaan Data Base Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Peningkatan Kerja Sama dalam Hal Penyelenggaraan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 % 100 %	1 Laporan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kesediaan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Persentase ketersediaan Data Base Kependudukan	100 % 100 %	20,000,000				
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						10,000,000							20,000,000				
2	12	04	2.04	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Kesediaan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Persentase ketersediaan Data Base Kependudukan	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 % 100 %	1 Laporan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kesediaan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Persentase ketersediaan Data Base Kependudukan	100 % 100 %	20,000,000				
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						70,000,000							80,000,000				
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan						70,000,000							80,000,000				
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Persentase Kesediaan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil	Laporan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemenuhan Ketersediaan Informasi Data Kependudukan Kabupaten Jeneponto	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 %	1 Laporan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kesediaan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil	100 %	20,000,000				

2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Persentase Kesiadaan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil	Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Peningkatan Pemenuhan Ketersediaan Informasi Data Kependudukan Kabupaten Jeneponto	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 %	1 Laporan	100 %	60,000,000	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Persentase Kesiadaan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil	100 %	60,000,000
TOTAL													7,116,648,840		7,334,988,306		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan dalam rangka menjaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, serta proses bagaimana program/kegiatan masyarakat diperoleh dan disesuaikan dengan Tupoksi SKPD.

Kajian terhadap usulan program dan kegiatan pada tahap ini berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat dan LSM, asosiasi perguruan tinggi maupun dari UPTD Kecamatan yang langsung ditujukan kepada SKPD, pokok-pokok pikiran DPRD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan inisiatif SKPD yang berasal dari survey lapangan dan pengamatan dari pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG).

Adapun beberapa hal yang perlu dikaji dan mendapat perhatian antara lain :

1. Analisis tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Analisis kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD;

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari masyarakat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022

SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Program / Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
		Desa / Kelurahan	Kecamatan			
1	2	3	4	5	6	7
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Empoang	Binamu	a. Persentase ASN yang meningkat Kompetensinya b. Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi	580.465.976 4.305941.104	

				Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan pemerintah Daerah	570.628.736	
	a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Empoang	Binamu Binamu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Di Susun Tepat Waktu	60.000.000	
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Empoang	Binamu Binamu	Jumlsh laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang di Susun Tepat Waktu	4.245.941.104	
	c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Empoang	Binamu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah.	680.465.976	
	d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Empoang	Binamu Binamu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	286.400.000	
	e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Empoang	Binamu	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Di Pelihara	284.228.736	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Empoang	Binamu	a. Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	155.687.750	
				b. Persentase Cakupan Kepemilikan kartu Tanda Penduduk	652.300.000	
				c. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas	561.625.274	

				Anak	
a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Empoang	Binamu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	155.687.750	
b. Penataan Pendaftaran Penduduk	Empoang	Binamu	Jumlah Laporan Penataan Pendaftaran Penduduk	652.300.000	
c. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Empoang	Binamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	561.625.274	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Empoang	Binamu	a. Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	45.000.000	
			b. Persentase penerbitan Akte Kelahiran	45.000.000	
a. Pelayanan Pencatatan Sipil	Empoang	Binamu	Jumlah Laporan Pelayanan Pencatatan Sipil	90.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Empoang	Binamu	Persentase Ketersediaan Data Base Kependudukan	30.000.000	
a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Base Kependudukan	Empoang	Binamu	Jumlah Laporan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Base Kependudukan	10.000.000	
b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Empoang	Binamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi	10.000.000	
c. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Empoang	Binamu	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Empoang	Binamu	Persentase Ketersediaan Profil Penduduk dan Catatan Sipil	70.000.000	
a. Penyusunan Profil Kependudukan	Empoang	Binamu	Jumlah Profil Kependudukan	70.000.000	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, diperlukan persepsi dan penekanan khusus dalam bentuk kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi berdasarkan pandangan-pandangan pucuk pimpinan organisasi karena kebijakan merupakan kumpulan keputusan yang berdimensi pada :

- a. Menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau aktivitas tertentu.
- b. Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran.
- c. Mengarahkan pada kondisi-kondisi dimana setiap pejabat/pelaksana dalam organisasi mengetahui apakah pejabat/pelaksana tersebut memperoleh dukungan untuk melaksanakan sesuatu.

Sesuai pengertian tersebut dan berdasarkan strategis dasar yang telah ditetapkan diatas, maka dirumuskan pokok-pokok kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto sebagai acuan dalam menetapkan program dan kegiatan prioritas dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. Didalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 01 tahun 2019 ditetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Visi Pembangunan Kabupaten Jeneponto dimaksud sebagai berikut:

“Jeneponto SMART 2023”.

Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Jeneponto ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jeneponto. Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu **Jeneponto SMART 2023** (Berdayasaing, Maju, Religius dan Berkelanjutan) dengan Misi yang diamanahkan adalah **Misi ke-2** yaitu : **Mewujudkan Peradaban Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan.** Dalam pencapaian visi, misi dan sasaran di atas tentunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus dapat mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi dari tiap aspek kajian baik dari sisi permasalahan berdasarkan pelayanan perangkat daerah, arahan RPJMD, arahan RTRW dan arahan KLHS.

Berdasarkan telaahan terhadap pelayanan perangkat daerah, maka Dinas mengidentifikasi 2 permasalahan utama, yaitu Capaian, Belum Optimalnya pelayan. Sedangkan berdasarkan arahan RPJMD 2018-2023, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah Rendahnya Capaian Pelayanan dan Belum Optimalnya Pelayanan. Hasil identifikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jeneponto akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan dan berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto.

VISI :

“JENEPONTO SMART 2023” (Berdaya Saing, MAju, Religius dan BerkelanjuTan)

MISI

Sebagai penjabaran dari Visi tersebut diatas, maka selama periode 2018-2023 ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- 2. Mewujudkan Peradaban Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan**
3. Mengoptimalkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
4. Melaksanakan Pengembangan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Secara Merata
5. Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Sumber Daya Daerah dan Investasi Yang Berkeadilan
6. Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Produktif, Transparan dan Akuntabel
7. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Nilai-Nilai Budaya
8. Menegakkan Supremasi Hukum, Keamanan dan Ketertiban

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RKPD dengan Rencana SKPD

"JENEPONTO SMART 2023"				
(BerdayaSaing, MAju, Religius dan BerkelanjuTan)				
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	T.1 Meningkatkan kualitas manusia	T.1.1 Indeks Pembangunan Manusia	S.1.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup
			S.1.2 Meningkatnya derajat pendidikan	Angka Melek Huruf

				masyarakat (JENEPONTO CARA'DE)	Rata - Rata Lama Sekolah
				S.1.3 Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender
					Indeks Pemberdayaan Gender
2.	Mewujudkan Peradaban Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan	T.2 Meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik	T.2.1 Indeks Reformasi Birokrasi	S.2.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas pelayanan	Nilai SAKIP
				S.2.2 Meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat
3	Mengoptimalkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	T.3 Meningkatkan kualitas tata kelola lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan	T.3.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	S.3.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air
					Indeks Kualitas Udara
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Hutan
4	Melaksanakan Pengembangan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Secara Merata	T.4.1 Meningkatkan Wilayah - Wilayah Pengembangan berbasis Potensi	T.4.1 Jumlah Kawasan Strategis Daerah	S.4.1 Meningkatnya produktivitas ekonomi kawasan perdesaan	Jumlah Kawasan Pedesaan cepat tumbuh yang terbangun (Unit Kawasan)
		T.4.2 Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah	T.4.2 Rata - rata persentase jangkauan infrastruktur wilayah Kabupaten *	S.4.2 Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana wilayah	1. Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik
					2. Persentase Penduduk Berakses Air Minum
					3. Persentase Penduduk Berakses Sanitasi
		T.4.3	T.4.3.1	S.4.2.2 Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni (Masuk ke Bab VIII)
5	Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Sumber Daya Daerah dan Investasi Yang Berkeadilan	T.5 Meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya perekonomian daerah	T.5.1 Pertumbuhan Ekonomi	S.5.1.1 Meningkatnya produktivitas dan pendapatan masyarakat	1. Pendapatan per kapita (Rupiah/tahun)
				S.5.1.2 Meningkatnya iklim investasi daerah yang kondusif	2. Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan
					Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

6	Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Produktif, Transparan dan Akuntabel	T.6 Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang baik berbasis TIK	T.6.1 tersedianya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang Terintegrasi Nilai <i>Monitoring Centre for Prevention Rencana Aksi</i> KPK	S.6.1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Opini BPK
				S.6.1.2 Meningkatnya produktivitas pendapatan asli daerah	Persentase pertumbuhan PAD
7	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Nilai-Nilai Budaya	T.7 Meningkatkan Pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai agama dan budaya	T.7.1 Jumlah Konflik SARA	S.7.1.1 Meningkatnya Kualitas kehidupan beragama	Jumlah menghafal Al-Qur'an sesuai kategori
				S.7.1.2. Meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
8	Menegakkan Supremasi Hukum, Keamanan dan Ketertiban	T.8 Meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat	T.8.1 Persentase Angka kriminalitas	S.8.1.1 Meningkatnya penegakan norma kehidupan dalam masyarakat	Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang ditangani

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Formulasi Pengukuran
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0.80	$\frac{\text{Jumlah Usia Penduduk > 17 yang ber KTP}}{\text{Jumlah Penduduk Usia > 17 atau telah menikah}}$
			Rasio bayi berakte kelahiran	1.00	$\frac{\text{Jumlah Bayi berakte kelahiran}}{\text{Jumlah Bayi}}$
			Ketersediaan database kependudukan skala	69,44	Ada / Tidak

			provinsi		
			Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah / Belum
			Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	80%	Jumlah KTP Ber NIK yang diterbitkan $\frac{\quad}{\quad} \times 100 \%$ Jumlah Penduduk Wajib KTP

Dampak pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas terhadap pencapaian Visi-Misi Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto sebagaimana telah dirumuskan dalam visi misi pembangunan Kabupaten Jeneponto diatas, bahwa pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto telah memberikan kontribusi yang nyata terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat khususnya pada Kepuasan Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan tujuan didasarkan pernyataan Visi dan Misi serta mengakomodasi isu-isu tren yang berkembang kearah perubahan. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai dimasa datang dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jeneponto Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan
2. Meningkatkan Pembangunan Data Base Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang Dinamis dan Akurat.
3. Mengembangkan Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
4. Meningkatkan Sosialisasi tentang Administrasi Kependudukan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Percepatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien.
2. Meningkatnya Perencanaan Pembangunan, Alokasi Anggaran, Pembangunan Demokrasi, Penegakan Hukum dan Pencegahan Kriminal.
3. Terwujudnya Sinkronisasi Data Kependudukan
4. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang administrasi kependudukan.

3.3 Program dan Kegiatan

A. Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang akan menjadi rumusan dalam rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto untuk tahun 2022 beberapa diantaranya masih tetap mempertahankan Program dan Kegiatan Tahun 2021 atau dengan kata lain program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahun 2021 sebagian masih akan dilanjutkan pelaksanaannya pada Rencana Kerja Tahun 2022 dengan pertimbangan bahwa masih banyak program dan kegiatan yang belum tuntas pelaksanaannya pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh karena keterbatasan anggaran serta defisit anggaran yang melanda APBD Kabupaten Jeneponto selama beberapa tahun terakhir ini.

Walaupun demikian Rumusan Program dan Kegiatan untuk Rencana Kerja Tahun 2022 yang akan datang tetap mempertimbangkan faktor-faktor antara lain :

- a. Faktor pencapaian Visi dan Misi Bupati Kepala Daerah Periode 2018-2023.
- b. Faktor Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030, yaitu :
 - (1) Menghapus kemiskinan : mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun;
 - (2) Mengakhiri Kelaparan : mengakhiri Kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan;
 - (3) Kesehatan yang baik dan Kesejahteraan : Memastikan kehidupan yang sehat dan Mendukung Kesejahteraan bagi semua untuk semua usia;
 - (4) Pendidikan Bermutu : Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua;
 - (5) Kesetaraan Gender : Mencapai Kesetaraan Gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
 - (6) Akses air bersih dan sanitasi : Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua;
 - (7) Energi bersih dan terjangkau : memastikan akses terhadap energy yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua;
 - (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi : Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua;

- (9) Infrastruktur, Industri dan Inovasi : membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi;
- (10) Mengurangi Ketimpangan : mengurangi ketimpangan didalam dan antar Negara;
- (11) Kota dan Komunitas yang berkelanjutan : membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- (12) Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab : Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
- (13) Penanganan perubahan iklim : Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- (14) Menjaga ekosistem laut : menkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudera, dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan;
- (15) Menjaga Ekosistem Darat : Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (Penggurunan) dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati;
- (16) Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat : mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif bagi semua level
- (17) Kemitraan untuk mencapai tujuan : Memperkuat ukuran dan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

- c. Pengentasan Kemiskinan
- d. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
- e. Pendayagunaan Potensi ekonomi daerah.
- f. Pengembangan daerah terisolir.

Dari faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rumusan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto tersebut di atas, dan dari 17 (Tujuh Belas) tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagaimana tersebut di atas, beberapa tujuan yakni Tujuan 1, Tujuan 5, Tujuan 8, dan Tujuan 9 yang menjadi sasaran dari program dan kegiatan.

B. Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang yaitu: Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengolahan data dan Sistem Informasi dan Bidang Pemanfaatan data dan Inovasi yang hal mana keempat bidang tersebut masing-masing memiliki Tugas dan Fungsi yang berbeda tetapi saling terkait satu sama lain. Untuk itu kami gambarkan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Pemetaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Pendaftaran Penduduk

1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk

- Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan
- 3. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 - Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
- C. Program Pencatatan Sipil
 1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
- D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 1. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 - Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
 2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
 3. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
 1. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan
 - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Jeneponto namun juga oleh sumber

pendanaan lainnya (APBN, APBD Provinsi Sulawesi Selatan, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							7,116,648,840				7,334,988,306				
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5,557,035,816				5,735,375,282			
2	12	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							60,000,000				60,000,000		
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023	Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	15,000,000

2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen RKA Pokok	Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	7,500,000
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	7,500,000

2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen DPASKPD	Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	7,500,000
2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	7,500,000

2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	7,500,000
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	7,500,000
2	12	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									4,245,941,104		4,288,907,745		

2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemenuhan Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan ASN yang dibayarkan	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan yang transparan dan akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	12 Bulan	100 %	4,061,961,104	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	4,104,927,745
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Buku Kas Umum (BKU), SPJ Fungsional Dan Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Jumlah Pengelola Keuangan	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan yang transparan dan akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	36 laporan 7 Orang	100 %	171,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	171,480,000

2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan yang transparan dan akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	1 Laporan	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	7,500,000
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Sem esteran SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan yang transparan dan akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	1 Laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	5,000,000
2	12	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										680,465,976		670,465,976	

2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Listrik yang disediakan	Tersedianya laporan administrasi umum perangkat daerah yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan	Kab. Jenepono, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	5 Jenis	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	30,000,000
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya laporan administrasi umum perangkat daerah yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan	Kab. Jenepono, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	1 Laporan	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	15,000,000

2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya laporan administrasi umum perangkat daerah yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	1 Laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	5,000,000
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang undangan yang diadakan	Tersedianya laporan administrasi umum perangkat daerah yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	1 Laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	5,000,000

2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Perjalanan yang di adakan	Tersedianya laporan administrasi umum perangkat daerah yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan	Kab. Jenepono, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	1 Laporan	100 %	615,465,976	Pajak Rokok DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	615,465,976
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							286,400,000			286,400,000		
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 % 100 % 100 %	1 Laporan	100 %	95,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	95,400,000

2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Jenepono, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	1 Laporan	100 %	191,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	191,000,000
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							284,228,736			429,601,561		
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan	Kab. Jenepono, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	1 Laporan	100 %	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	94,630,000

2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 % 100 % 100 %	1 Laporan	100 %	219,228,736	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	334,971,561
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							1,369,613,024		1,369,613,024			
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk							155,687,750		155,687,750			
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Laporan Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Bagi Masyarakat Jeneponto	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	85 % 85 % 85 %	1 Laporan	85 %	71,030,750	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	85 % 85 % 85 %	71,030,750
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Jumlah Laporan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Bagi Masyarakat Jeneponto	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	85 % 85 % 85 %	1 Laporan	85 %	84,657,000	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	85 % 85 % 85 %	84,657,000

2	12	02	2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk							652,300,000							652,300,000	
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Laporan Hasil Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	85 % 85 % 85 %	1 Laporan	85 %	652,300,000	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga Persentase Cakupan Kepemilikan kartu Tanda Penduduk Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	85 % 85 % 85 %	652,300,000		
2	12	02	2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk							561,625,274							561,625,274	
2	12	02	2.03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat akan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	85 % 85 % 85 %	1 Laporan	85 %	561,625,274	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Persentase Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	85 % 85 % 85 %	561,625,274		
2	12	03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL							90,000,000							90,000,000	
2	12	03	2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil							90,000,000								90,000,000
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Persentase Penerbitan Akta Kematian	Jumlah Laporan Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Bagi Masyarakat Jeneponto	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	85 % 85 %	1 Laporan	85 %	90,000,000	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Persentase Penerbitan Akta Kematian	85 % 85 %	90,000,000		
2	12	04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							30,000,000							60,000,000	
2	12	04	2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database							10,000,000								20,000,000

					Kependudukan																				
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Kesediaan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Persentase ketersediaan Data Base Kependudukan	Jumlah Laporan hasil Kerja Sama Pemanfaatan Data kependudukan	Peningkatan Pemanfaatan Data Base Kependudukan	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 % 100 %	1 Laporan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Kesediaan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Persentase ketersediaan Data Base Kependudukan	100 % 100 %	20,000,000							
2	12	04	2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									10,000,000	20,000,000											
2	12	04	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Persentase Kesediaan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Persentase ketersediaan Data Base Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Peningkatan Kerja Sama dalam Hal Penyelenggaraan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 % 100 %	1 Laporan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Kesediaan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Persentase ketersediaan Data Base Kependudukan	100 % 100 %	20,000,000							
2	12	04	2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									10,000,000	20,000,000											
2	12	04	2.04	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Kesediaan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Persentase ketersediaan Data Base Kependudukan	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 % 100 %	1 Laporan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Kesediaan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Persentase ketersediaan Data Base Kependudukan	100 % 100 %	20,000,000							
2	12	05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN									70,000,000	80,000,000											
2	12	05	2.01	Penyusunan Profil Kependudukan									70,000,000	80,000,000											
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Persentase Kesediaan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil	Laporan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemenuhan Ketersediaan Informasi Data Kependudukan Kabupaten Jeneponto	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 %	1 Laporan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Kesediaan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil	100 %	20,000,000							

2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Persentase Kesiadaan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil	Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Peningkatan Pemenuhan Ketersediaan Informasi Data Kependudukan Kabupaten Jeneponto	Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang	100 %	1 Laporan	100 %	60,000,000	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Persentase Kesiadaan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil	100 %	60,000,000
TOTAL													7,116,648,840		7,334,988,306		

BAB V

P E N U T U P

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto diharapkan prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD. Dalam kaitan ini maka kerjasama Pemerintah dengan DPRD sangat diperlukan sehingga program-program tersebut dapat direalisasikan secara optimal.

SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA- SKPD) Tahun 2021. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto dan Kepala SKPD mengevaluasi program-program yang dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan sebagai bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Gubernur Sulawesi Selatan.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan SKPD adalah :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja SKPD
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis



H. MUHAMMAD JAFAR ABBAS, SE, M.Pd
Pembina TK.I
NIP. 19660620 199403 1 012